

**PENGUNAAN HASIL RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING UNTUK
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA
LOKAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : MUSALMAN ALWAHIDIN
NPM : 1374201367

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penggunaan Hasil Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Pengembangan Ketrampilan Pekerja Lokal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tujuan penelitian ini menjelaskan Penggunaan Hasil Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Pengembangan Ketrampilan Pekerja Lokal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penggunaan Hasil Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Pengembangan Ketrampilan Pekerja Lokal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kesimpulan penelitian ini adalah: Penggunaan Hasil Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Pengembangan Ketrampilan Pekerja Lokal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di kota dumai belumlah sepenuhnya dirasakan masyarakat dumai, sebab pembayaran retribusi IMTA dapat dilakukan di kas daerah dicatat sebagai penerimaan daerah dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Padahal seharusnya dana restribusi di gunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan peningkatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Hambatan yang dihadapi Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai terhadap TKA yang ada di kota Dumai, Belum optimalnya program sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari Depnakertrans, Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan Disnakertrans Provinsi Riau atau Depnakertrans sebagai instansi yang mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Upaya yang dilakukan Untuk mengatasi hambatan dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), melakukan kontrol terhadap proses pemungutan retribusi pembuatan dan perpanjangan IMTA yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja, membentuk tim penyidik yang diberi nama PPNS untuk menunjang proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam perizinan tenaga kerja.

